

TANGGAPAN PETERNAK TENTANG KEBERADAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS DI DAERAH PEDESAAN

Aslina Asnawi¹⁾, Andi Amidah Amrawaty¹⁾, Nirwana²⁾

¹⁾Dosen Departemen Sosial Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin, Makassar

²⁾Dosen Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar
Email korespondensi : aslinaasnawi@yahoo.com

Abstrak

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis merupakan salah satu unit otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang diperuntukkan untuk memecahkan masalah atau kendala akses permodalan anggotanya. Lembaga tersebut dibentuk dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan tanggapan peternak sapi potong terhadap keberadaan LKM-A di daerah pedesaan. Penelitian ini merupakan deskriptif yang dilakukan di Kabupaten Sinjai. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner dan melakukan *indepth interview* kepada peternak, pengurus Kelompok Tani Ternak dan Pengurus Gapoktan. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan LKM-A sangat membantu peternak dalam membantu akses permodalan, persyaratannya mudah, jumlah pinjaman yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan peternak, proses pengajuan pinjaman ke LKM-A mudah dan cepat, dan jangka waktu pengembalian pinjaman sesuai dengan kemampuan peternak. Oleh karena itu perlu dukungan dari semua pihak agar LKM-A yang masih eksis sampai sekarang dapat bertahan sehingga tetap dapat memfasilitasi anggota Gapoktan dalam mengakses pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai usaha Peternakan sapi yang dijalankan.

Kata Kunci: Tanggapan Peternak, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis, Permodalan

1. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu langkah untuk mengatasi kendala pembiayaan bagi peternak di daerah pedesaan. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh peternak untuk mengakses pembiayaan dari lembaga pembiayaan formal seperti perbankan menguatkan keberadaan LKM di pedesaan. Prosedur yang panjang dan butuh waktu yang lama, persyaratan *collateral*, lokasi yang relatif jauh, rendahnya informasi tentang sumber-sumber pembiayaan serta relatif rendahnya *relationship* antara peternak di pedesaan dengan lembaga pembiayaan formal menjadi determinan peternak dalam mengakses pembiayaan ke lembaga pembiayaan formal (Asnawi, 2013; Nurmanaf, 2007).

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis salah satu bentuk LKM yang telah dimanfaatkan oleh peternak. LKMA merupakan lembaga keuangan di tingkat peternak yang dikoordinir oleh Gabungan Kelompok Tani penerima BLM PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan). Program ini didasarkan pada kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian pada 2008 tentang PUAP yang selanjutnya pelaksanaannya mengacu pada pola dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2009 dan

disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yaitu pendidikan dan latihan untuk pengembangan usaha, pendampingan dan pemberian fasilitas bantuan modal usaha kepada petani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Dalam perkembangannya ada gapoktan yang tidak mampu bertahan namun tidak sedikit pula yang masih eksis sampai sekarang. Komitmen pengurus dan anggota gapoktan dalam memanfaatkan LKMA sebagai salah satu lembaga pembiayaan informal di daerah pedesaan merupakan salah satu faktor yang mendukung keberlanjutan LKMA tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan Asnawi, dkk (2018) bahwa LKMA telah berperan dalam mendorong penguatan kelembagaan kelompok tani ternak di daerah pedesaan dan mengentaskan kemiskinan.

Tingkat partisipasi masyarakat terutama peternak juga ditentukan bagaimana tanggapan mereka terhadap keberadaan LKMA di daerah pedesaan. Jika tanggapannya positif bisa saja mendorong mereka untuk berperan dan berpartisipasi dalam menumbuhkan lembaga tersebut namun sebaliknya jika tanggapannya negatif maka tentunya akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan LKMA. Oleh karena itu maka studi ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan peternak terhadap keberadaan LKMA di daerah pedesaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. Dipilihnya daerah ini sebagai lokasi penelitian karena terdapat LKMA yang masih eksis sampai sekarang. Objek peneliti dalam studi ini adalah anggota Kelompok Tani Ternak yang memanfaatkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di daerahnya. Populasi penelitian diambil dari seluruh peternak sapi potong yang berada di Kecamatan Sinjai Timur dimana di daerah ini terdapat dua Gapoktan yang sangat aktif dan tetap eksis dalam mengelola LKMA. Jumlah anggotanya 140 orang di Desa Patalasang dan 130 orang di Desa Biroro sehingga totalnya ada 270 orang. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin (Umar, 2001) yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Dimana : n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e² = prepesisi (tingkat kelonggaran yang ditetapkan sebesar 15%)

Dengan menggunakan rumus tersebut maka jumlah sampel yang diambil adalah 38 orang. Jadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 38 peternak. Jumlah sampel pada masing-masing desa adalah:

- a. Desa Patalassang = $\frac{140}{270} \times 38 = 18$ orang
- b. Desa Biroro = $\frac{130}{270} \times 38 = 20$ orang

Penentuan sampel secara *Simple Random Sampling* yaitu pengambilan sample dilakukan secara acak dengan cara mengundi nama peternak yang terpilih.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang tanggapan peternak terhadap keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Kabupaten Sinjai diperoleh dari 38 responden. Adapun tanggapan tentang LKMA dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar peternak (63,16%) telah mengetahui keberadaan LKMA di daerahnya. Hal ini juga didukung oleh 60,53% peternak yang menyatakan setuju bahwa telah dilakukan sosialisasi LKMA sebelumnya. Hal ini didukung oleh keberadaan Kelompok Tani Ternak di daerah tersebut yang sangat aktif untuk memperkenalkan LKMA sebagai salah satu lembaga yang dibentuk oleh dan untuk anggota kelompok dibawah koordinir Gapoktan di masing-masing desa. Yang selanjutnya melalui gapoktan inilah cikal bakal lahirnya LKMA untuk menyalurkan dana PUAP waktu itu. Peran gapoktan ini sesuai dengan penjelasan pada Syahyuti (2007).

Kondisi tersebut diperkuat oleh komitmen dari pengurus untuk menyalurkan dana PUAP dan selanjutnya mengembangkan LKMA yang telah dibentuk menjadi wadah untuk melayani simpan pinjam anggotanya. Selain itu partisipasi anggota dari masing-masing kelompok tani ternak juga sangat baik dimana setiap kali ada pertemuan dan kegiatan kelompok, partisipasi anggota dalam bentuk kehadiran rapat/pertemuan sangat besar. Dengan demikian ketika ada sosialisasi dan informasi tentang kegiatan-kegiatan kelompok dapat diketahui oleh semua anggota. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk berkelompok bagi peternak di daerah tersebut sangat besar. Kondisi ini mengkonfirmasi penelitian Masmulyadi (2007) bahwa kesadaran yang perlu dibangun pada petani adalah kesadaran berkomunitas/berkelompok yang tumbuh atas dasar kebutuhan bukan karena paksaan atau dorongan tertentu. Selain itu dengan demikian fungsi kelompok telah berperan menjadi tempat untuk bertukar pikiran dan penyebaran informasi (Asnawi dan Hastang, 2015).

Tabel 1. Tanggapan Peternak Sapi Potong Terhadap Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Daerah Pedesaan

Deskripsi Tanggapan tentang Keberadaan LKMA	Setuju		Netral		Tidak setuju	
	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Tahu tentang keberadaan LKMA	24	63.16	14	36.84	0	0
LKMA sudah pernah disosialisasikan	23	60.53	12	31.58	3	7.89
Prosedur simpan pinjamnya mudah dan cepat	20	52.63	12	31.58	6	15.79
Persyaratannya mudah	21	55.26	15	39.48	2	5.26
Membantu mengurangi kendala pembiayaan	28	73.69	9	23.68	1	2.63
Bermanfaat meningkatkan kapasitas usaha Peternakan sapi potong	20	52.63	15	39.48	3	7.89

Sumber: Data Primer, 2018.

Tabel 1. pun menunjukkan bahwa tanggapan peternak terhadap prosedur simpan pinjam pada LKMA yang mudah dan cepat ditanggapi setuju oleh sebagian besar peternak yaitu (52,63%). Setiap anggota memiliki kewajiban untuk menyetorkan simpanan wajib dan simpanan pokok. Selain itu setiap anggota pun dapat menyetorkan simpanan sukarela kepada LKMA. Jumlah ketiga simpanan tersebut tidak terlalu besar dimana simpanan wajib hanya Rp 5.000,00 per bulan, simpanan pokok dan simpanan sukarela tergantung pada kemampuan masing-masing anggota. Dana yang tersimpan di LKMA tersebut selanjutnya dapat dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Selain itu dari dana PUAP yang sudah ada di Gapoktan dapat dipinjamkan pula kepada anggota sebesar maksimal Rp 5.000.000,00 per anggota.

Untuk meminjam kredit di LKMA, prosedurnya pun tidak sulit karena cukup dengan modal kepercayaan antara pengurus dan anggotanya, menunjukkan keseriusan untuk meminjam dan benar-benar membutuhkan dana untuk meningkatkan kapasitas usaha peternakan sapi yang dijalankannya. Hal ini lebih mudah karena tentunya pengurus kelompok tani mengetahui

kondisi dan kemampuan usaha anggotanya. Hal ini menjadi salah satu potensi LKMA karena berada di daerah pedesaan sehingga mampu mengetahui kondisi anggotanya. Hal ini dijelaskan oleh Krisnamurti (2005) bahwa LKM di daerah pedesaan lebih fleksibel karena prosedurnya administrasinya tidak rumit, mudah diakses dan hanya didasarkan kepercayaan karena sudah saling kenal dan dana yang dibutuhkan dapat segera diperleh kapan pun dibutuhkan.

LKMA dianggap sebagian besar peternak telah membantu mengurangi kendala pembiayaan di daerah pedesaan yaitu sebanyak 73,69% yang menjawab setuju. Hal ini dikarenakan oleh kemudahan dalam mengakses serta kemampuan LKMA untuk menyalurkan dana kepada anggotanya sesuai dengan kebutuhannya maka peternak merasa bahwa keberadaan LKMA telah membantu mengatasi masalah pembiayaan. Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan dana bagi peternak pun tidak terlalu besar, biasanya hanya dibutuhkan untuk membiayai modal kerja dari usaha peternakan sapi potong yang dijalankannya. Kecilnya kebutuhan dana rata-rata setiap peternak jika harus diakses pada lembaga pembiayaan formal seperti perbankan tentunya akan menjadi tidak efisien. Sehingga dengan keberadaan LKMA di daerah pedesaan sangat membantu mengatasi kendala pembiayaan bagi peternak. Hal ini mengkonfirmasi potensi LKM yang dijelaskan oleh Ashari (2006) bahwa LKM mudah diakses oleh petani karena umumnya berada di daerah pedesaan, prosesnya tidak panjang, karakteristik usaha tani umumnya membutuhkan platform kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM, kredit dapat disalurkan dengan tepat waktu dan jumlah yang tepat karena lokasinya yang dekat, serta ada keterkaitan *social-cultural* dan hubungan yang bersifat *personal-emosional* sehingga dapat mengurangi *moral hazard* dalam pengembalian kredit.

Keberadaan LKMA juga ditanggapi oleh sebagian besar peternak telah membantu dalam meningkatkan kapasitas usaha peternakan sapi potong yang dijalankan oleh anggotanya. Hal ini disebabkan karena anggota yang memperoleh pinjaman dari LKMA memanfaatkan dananya untuk membeli pakan, memperbaiki kandang, membeli peralatan kandang atau membeli bibit sapi yang selanjutnya dipelihara untuk dikembangbiakan. Dengan demikian maka secara tidak langsung keberadaan LKMA di daerah pedesaan telah membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan.

Tanggapan yang positif dari masyarakat di daerah pedesaan terhadap LKMA menjadi salah satu modal untuk tumbuh dan berkembangnya serta keberlanjutan LKMA di masa yang akan datang meskipun tidak berbasis program pemerintah lagi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa LKMA di daerah pedesaan telah disambut baik oleh masyarakat peternak. Apresiasi yang sangat besar bagi Gapoktan yang tetap mempertahankan dan melanjutnya

kegiatan LKMA di daerah pedesaan khususnya di Desa Patalassang dan Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di daerah pedesaan ditanggapi sangat baik oleh peternak karena mudah diperoleh informasinya, telah disosialisasikan terlebih dahulu, persyaratan untuk simpan pinjam mudah, prosedur untuk meminjam mudah dan cepat, mengatasi kendala pembiayaan serta telah membantu meningkatkan kapasitas usaha Peternakan sapi potong anggotanya. Tanggapan yang positif menunjukkan bahwa keberadaan LKMA di daerah pedesaan dapat diterima oleh masyarakat pedesaan. Oleh karena itu potensi dan semangat LKMA harus tetap dilanjutkan sebagai salah satu langkah untuk mengurangi kendala akses pembiayaan peternak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ashari. 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 4 No. 2. Juni. Pp. 146-164.
- Asnawi, A. 2013. Determinant of Funding Accessibility and its Impacts to The Performance of Beef-Cow Breeding Enterprises in South Sulawesi Province, Indonesia. *European Journal of Business and Management*. Vol.5, No.29, 2013. ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online).
- Asnawi, A dan Hastang. 2015. Pengaruh Karaktersitik Peternak Sapi Potong dengan Keterlibatan Mereka dalam Kelompok Tani/Ternak di Pedesaan. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan*. Vol. 4 No. 2 Juli 2015. ISSN: 2086-6216: 74-78.
- Asnawi, A., A.A. Amrawaty, Nirwana, T. Amrullah, R. Sudarmadji. 2018. Peranan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mengatasi Kendala Permodalan bagi Peternak di Pedesaan. *Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan III. "Hilirisasi Teknologi Peternakan pada Era Revolusi Industri 4.0"* Semarang 3 Mei 2018. ISBN: 978-602-72086-3-6: 736-740.
- Direktorat Pembiayaan Pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Kementerian Pertanian. 2014. *Pedoman Pengembangan LKM-A pada Gapoktan PUAP*.
- Krisnamurti, B. 2005. *Pengembangan Keuangan Mikro Bagi Pembangunan Indonesia*. Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat, Edisi IV Maret 2005.
- Masmulyadi. 2007. Membangun Kesadaran dan Keberdayaan Petani. Diakses dari Internet tanggal 14 Maret 2007.
- Nurmanaf, A.R. Lembaga Informal Pembiayaan Mikro Lebih Dekat dengan Petani. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Vol. 5 No. 2 Juni 2007: 99-109.
- Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Perdesaan. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 5 No. 1 Maret 2007: 15-35.
- Umar, H. 2001. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.